

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi maka dapat disimpulkan beberapa hal secara umum maupun khusus. Simpulan tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

Internet dan media baru berbasis digital hari ini telah mampu ditransformasikan menjadi infrastruktur warga negara dan alat mobilisasi massa. Infrastruktur warga negara digital berupa filantropi dan voluntarisme digital telah menjadi alat penyeimbang, pengingat, dan sumplemen gerakan sosial baru dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Filantropi dan voluntarisme digital telah mendorong terjadinya aktivisme yang mengarah pada peningkatan praktik *civic philanthropy* dan *civic voluntarism*. Infrastruktur ini memiliki pengaruh besar pada budaya partisipatif kaum muda yang lebih inklusif yaitu partisipasi publik dibidang *community life*. Internet dan media baru telah menghasilkan paradigma baru bagi kewarganegaraan partisipatif yaitu sebagai alat pemberdayaan bagi warga negara muda. Aktivisme gerakan sosial sebagaimana disebutkan telah menghasilkan dua perspektif. *Kesatu* bahwa internet dan media baru dapat memfasilitasi aktivisme daring. *Kedua* internet meningkatkan praktik gerakan yang ada dengan mengembangkan kampanye dan konsolidasi daring melalui berbagai metode. Disisi lain, infrastruktur ini juga telah memfasilitasi partisipasi lokal dan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan lokal dan global secara unik terkait dengan partisipasi warga negara dalam gerakan dan bahwa infrastruktur digital memainkan peran penting dalam proses ini dengan menumbuhkan rasa kewarganegaraan dalam konteks lokal dan global.

Keterlibatan publik pada program-program berskala global meliputi global zakat, global wakaf, global qurban adalah aktualisasi kewarganegaraan global. Penelitian ini juga telah menemukan bahwa secara umum aktivisme warga negara di bidang sosial dan kemanusiaan melalui gerakan sosial berbasis digital didorong oleh dimensi-dimensi emotif dan ketersediaan infrastruktur kewarganegaraan digital. Bagi warga digital, partisipasinya telah menjadi wahana untuk mengembangkan tiga dimensi kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Ketiga dimensi tersebut bermuara pada pembentukam komitmen sebagai wujud *civic virtue* di bidang sosial.

5.1.2. Simpulan Khusus

5.1.2.1. Peran lembaga kemanusiaan global ACT dalam mengorganisir gerakan sosial Let's ACT Indonesia yaitu: *Kesatu*, menciptakan infrastruktur filantropi dan voluntarisme digital yang menawarkan nilai kemudahan bagi warga negara untuk menjalankan kewajibannya menyalurkan sumber daya yang dimiliki; *Kedua*, merancang mengoperasikan dan mengkampanyekan program-program yang memfasilitasi partisipasi lokal dan global; *Ketiga*, merancang mengoperasikan dan mengkampanyekan program-program yang menguatkan proses pemberdayaan sosial sebagai solusi dari masalah sosial dan krisis kemanusiaan. Program filantropi dan voluntarisme sebagaimana dimaksud mengarah pada aksi-aksi kolektif dalam rangka pembangunan pada bidang kemasyarakatan, kemanusiaan, dan pendidikan. Sejumlah prinsip yang diterapkan ialah praktis, efisien, fleksibel, akuntabel, dan aktual. Infrastruktur filantropi digital, rekrutmen relawan secara daring, serta program-program kerelawanan yang 'kekinian' adalah strategi yang ditempuh dalam membina praktik keadaban warga negara (*civic virtue*) yang terwujud dalam kepedulian dan spirit pemberdayaan sosial dikalangan warga negara.

5.1.2.2. Pengembangan gerakan sosial berbasis digital memiliki asosiasi positif dengan tingginya partisipasi warga negara muda. Separuh donatur ACT berdonasi secara daring. Mayoritas pegiat sosial ACT juga ikut serta dalam gerakan sosial melalui aktivisme daring. Peningkatan keterlibatan warga negara sebagaimana digambarkan didorong oleh ketersediaan infrastruktur filantropi digital dan voluntarisme yang termobilisasi melalui rekutmen daring, budaya organisasi secara digital, dan pelbagai diskusi tentang isu-isu sosial kemanusiaan dalam ruang publik baru berbasis digital. Realitas kesukarelaan tersebut kemudian terhimpun dan tersalurkan dalam bentuk: (1) bantuan kemanusiaan global (*global humanitarian response*); (2) bantuan kemanusiaan lokal dan nasional (*emergency fund*, bantuan pendidikan, *humanity fund*); (3) program-program kerelawanan, aksi-aksi sosial, diskusi publik, dan kampanye kemanusiaan untuk mempengaruhi kebijakan.

5.1.2.3. Aktivisme warga negara di bidang sosial dan kemanusiaan melalui gerakan sosial berbasis digital didorong oleh efikasi diri dalam berdigital, nilai religiusitas, solidaritas dan kemanusiaan, rasa percaya (*trust*), kepedulian warga negara, pemahaman global, ketersediaan infrastruktur filantropi digital, dan pengalaman positif baik secara emotif maupun rasional.

5.1.2.4. Beberapa dampak yang dirasakan oleh warga negara dengan dikembangkannya gerakan sosial berbasis digital mencakup: *Kesatu*, pembinaan kepedulian warga negara melalui *civic philanthropy* dan *civic voluntarism* lokal-global; *Kedua*, terbangunnya budaya pemanfaatan infrastruktur kewarganegaraan digital bagi warga negara muda sebagai *digital native* yang mengarah pada model kewarganegaraan digital; *Ketiga* penguatan partisipasi warga negara dalam proses pembangunan dan pemberdayaan sosial. Ketiganya secara utuh mengembangkan tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu (1) pengetahuan warga negara berupa literasi tentang masalah sosial

dan krisis kemanusiaan teraktual baik pada lingkup lokal, nasional, maupun global berikut gagasan-gagasan dan ide-ide untuk meresponnya; (2) keterampilan warga negara meliputi *intellectual skills* dan *participatory skills* yaitu keterampilan berdigital secara positif, dan bertindak partisipatif sesuai kecakapannya atas dasar kemelekwacanaannya atau nilai personal yang dimilikinya untuk urusan-urusan publik; dan (3) watak warga negara dalam sosial-kemanusiaan yaitu karakter publik dan karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, kepedulian warga negara, mengindahkan aturan main.

5.2. Implikasi

Penelitian tentang pembinaan *civic virtue* di bidang sosial melalui praktik filantropi dan voluntarisme ini memiliki beberapa implikasi. Hasil penelitian telah mengkonstruksi paradigma baru tentang media digital dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Internet dan media baru mampu membina kewarganegaraan digital berupa perilaku normatif warga negara. Lebih jauh, internet mampu menjadi wahana edukatif, membina literasi, bahkan aktivisme yang mendorong pertumbuhan budaya kewarganegaraan digital yang partisipatif. Fenomena ini penting untuk diangkat sebagai upaya memerangi potensi penyalahgunaan media digital dan perilaku internet yang destruktif di kalangan warga digital (*digital citizens*). Misalnya, akses konten pornografi, prostitusi *online*, ujaran kebencian (*hate speech*), perjudian dan penipuan *online* dan kejahatan atau pelanggaran *Cyber Law* lainnya.

Implikasi berikutnya ialah pada aspek lapangan ilmu. Penelitian ini telah menyumbang konsep dan teori tentang pembinaan keadaban kewarganegaraan melalui gerakan sosial berbasis digital. Terutama sampel dari model kewarganegaraan partisipatif. Studi ini telah menjelaskan posisi dan kekuatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial kemanusiaan yang berkombinasi dengan pemanfaatan digital. Secara teoretis

hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan PKn terkait desain dan model pendidikan kewarganegaraan pada domain sosio-kultural. Studi ini juga menyumbang gagasan tentang infrastruktur kewarganegaraan digital yang layak, gambaran partisipasi warga negara di era digital, faktor pendorong keterlibatan warga negara dalam gerakan sosial berbasis digital, dan dampak gerakan sosial terhadap pembinaan *civic virtue* di bidang sosial pada era digital.

Implikasi terakhir ialah pada sektor kewarganegaraan, sosial, dan pendidikan. Meningkatnya kesukarelaan warga negara di bidang sosial kemanusiaan berkat ketersediaan infrastruktur kewarganegaraan digital adalah potensi dalam membangun demokrasi dan masyarakat madani. Gagasan ini dapat pula diaplikasikan pada gerakan-gerakan di bidang lainnya seperti voluntarisme politik, gerakan kepemudaan, gerakan lingkungan, gerakan literasi dan lain sebagainya. Namun, tentunya perkembangan tersebut harus diimbangi dengan regulasi yang memadai. Karena kebijakan dan hukum pada hakikatnya harus turut mengikuti semangat zaman atau bahkan mejadi prediktor. Pada aspek pendidikan, hasil penelitian ini menjadi refleksi bagi penguatan kurikulum kewarganegaraan berbasis *digital citizenship* dan *service learning*. Konstruksi kurikulum tersebut merupakan upaya penanaman kewarganegaraan digital, karakter kepedulian warga negara, dan spirit pemberdayaan sosial dikalangan warga negara muda.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka dapat peneliti ajukan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

5.3.1. Bagi *Community Civic*

Menciptakan infrastruktur digital kewarganegaraan merupakan suatu jalan yang mendukung proses pembangunan. Maka, sebagai *community civic*, kreativitas dan kapabilitas ini diharapkan mampu terus dikembangkan agar tercipta infrastruktur-infrastruktur digital lainnya yang mampu mendorong keterlibatan warga negara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa warga negara

hari ini tidak bisa terlepas dari digital. Diharapkan efisiensi dan efektivitas digital dapat dioptimalkan dalam aspek berwarga negara.

5.3.2. Bagi Pemerintah

Dewasa ini dalam hal berwaragnegara telah banyak melibatkan media komunikasi digital. Atas dasar itu, bagi pemerintah, peneliti merekomendasikan untuk lebih serius dalam menciptakan infrastruktur-infrastruktur digital lain yang relevan dan dapat memudahkan warga negara untuk mengaktualisasikan tanggung jawab moralnya. Termasuk upaya-upaya kolaboratif dengan warga negara, organisasi kemasyarakatan, komunitas sudah sepatutnya ditingkatkan dan dioptimalkan. Peneliti juga merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan dan program yang tepat yang mampu mengatur dan menjadi panglima bagi perkembangan digital. Selanjutnya peneliti juga merekomendaikan agar pemerintah melakukan penguatan kurikulum kewarganegaraan berbasis kewarganegaraan digital, kewarganegaraan global, dan *service learning*.

5.3.3. Bagi Praktisi Pendidikan Kewarganegaraan

Bagi praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, peneliti menyarankan agar hendaknya kewaragengaraan dipandang secara lebih generik dan kontekstual. Sehingga perkembangan disiplin keilmuannyapun bukan hanya menyoal isu-isu terkait bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran di kelas secara formalistik saja. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya ialah upaya untuk membentuk warga negara yang partisipatif yang bukan sekadar tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik saja, tetapi yang mampu mengaplikasikannya secara inklusif di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Isu-isu berwarganegara dalam aktivitas politik dan nonpolitik hendaknya mendapat perhatian kita bersama.

5.3.4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian PKn pada domain sosio kultural di era digital memang belum banyak memperoleh sorotan dari peneliti bidang PKn di seluruh Indonesia. Untuknya, melalui penelitian ini, peneliti mengusulkan agar kedepan lebih banyak dilakukan penelitian-penelitian lain yang mengangkat topik

warga negara dalam kaitannya dengan digital. Hal ini peneliti anggap penting karena sifatnya yang kontekstual. Banyak kemajuan sekaligus persoalan yang dihasilkan oleh perkembangan digital. Penelitian-penelitian kedepan, diharapkan mampu meminimalisir dampak buruk digital bagi warga negara dilihat dari tiga dimensi kewarganegaraan dan budaya kewarganegaraan.